Journal of Communication Management and Organization
Desember 2026, Vol. 5, No. 2, pp.66-80
E-ISSN: 2830-1439

Konstruksi Realitas Sosial Keterbukaan Suku Pekal Terhadap Etnis Pendatang di Kota Bengkulu

Chairunnisa Az-zahra[1], Jelsha Pharasianthes Assyura[2], Rendi Sulistiyo[3], Novi Widiyan Rizki[4], Rama Dwi Saputra[5]

Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Bengkulu[1,2,3,4,5,6]

Email Korespondensi: chairunnisaazzahra03621@gmail.com

Diterima: 13-11-2026 Disetujui: 25-11-2022 Diterbitkan: 10-12-2026

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji sistem kaum dalam masyarakat Suku Pekal sebagai mekanisme integrasi sosial terhadap etnis pendatang di Kota Bengkulu. Suku Pekal merupakan kelompok etnis asli yang terbentuk melalui proses akulturasi dari tiga suku besar, yakni Minangkabau, Rejang, dan Melayu, sehingga memiliki identitas budaya yang dinamis dan terbuka. Sistem kaum dalam masyarakat Pekal berfungsi layaknya marga atau klan yang mengatur tatanan sosial masyarakat, termasuk proses penerimaan etnis pendatang ke dalam komunitas. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam semi-terstruktur dengan empat informan kunci yang dipilih secara purposive, yaitu perwakilan komunitas Ikatan Mahasiswa Ipuh (IMSI) yang terdiri dari Azam selaku ketua umum dan Atika selaku wakil ketua umum, mahasiswa Ilmu Komunikasi angkatan 2024 bernama Jeffry, warga Desa Bagindo Bungkuk di Mukomuko bernama Azim, serta Hadison selaku Ketua Ikatan Pemuda Pekal. Analisis data dilakukan dengan model analisis interaktif Miles, Huberman, dan Saldana yang mencakup kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa setiap desa dalam wilayah Suku Pekal memiliki kaum yang berbeda-beda dengan adat istiadat yang beragam. Etnis pendatang sangat disarankan untuk bergabung ke dalam kaum karena kaum ibarat sebuah marga, jika tidak bergabung maka urusan sosial etnis tersebut tidak akan sepenuhnya diperhatikan oleh masyarakat setempat. Tata cara masuk kaum bervariasi antarkaum, namun secara umum mencakup silaturahmi kepada kepala kaum, kontribusi finansial, dan penyelenggaraan syukuran. Melalui kerangka Berger dan Luckmann, proses ini dianalisis sebagai bentuk eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi nilai-nilai budaya Pekal. Keterbukaan Suku Pekal terwujud melalui partisipasi aktif etnis pendatang dalam perayaan adat, yang mencerminkan tingkat integrasi budaya yang tinggi.

Kata Kunci: Konstruksi Realitas; Kaum; Suku Pekal; Etnis Pendatang

This work licensed under attribution-sharealike 4.0 international (CC BY-SA 4.0)

Journal of Communication Management and Organization
Desember 2026, Vol. 5, No. 2, pp.66-80
E-ISSN: 2830-1439

Abstract

This study aims to examine the kaum (clan) system within the Pekal ethnic community as a mechanism of social integration for migrant ethnicities in Mukomuko Regency, Bengkulu Province. The Pekal tribe is an indigenous ethnic group formed through the acculturation of three major ethnic groups, namely Minangkabau, Rejang, and Malay, resulting in a dynamic and open cultural identity. The kaum system in Pekal society functions similarly to a clan or lineage group that governs the social order of the community, including the process of accepting migrant ethnicities into the community. This research employs a qualitative approach with a case study design. Data were collected through semi-structured in-depth interviews with four key informants selected purposively, representatives of the IMSI community (Ikatan Mahasiswa Ipuh), namely Azam as chairperson and Atika as vice chairperson, a 2024 Communication Science student named Jeffry, a resident of Bagindo Bungkuk Village in Mukomuko named Azim, and Hadison as the Chairman of the Pekal Youth Association. Data analysis was conducted using the interactive analysis model of Miles, Huberman, and Saldana, encompassing data condensation, data display, and conclusion drawing. The findings reveal that each village in the Pekal tribal territory has different kaum with varying customs. Migrant ethnicities are strongly encouraged to join a kaum because it functions like a lineage group, without membership, their social affairs will not be fully attended to by the local community. The procedure for joining a kaum varies across clans but generally involves visiting the kaum leader, making a financial contribution, and holding a thanksgiving ceremony. Through the Berger and Luckmann framework, this process is analyzed as a form of externalization, objectivation, and internalization of Pekal cultural values. The openness of the Pekal tribe is manifested through the active participation of migrant ethnicities in traditional celebrations, reflecting a high degree of cultural integration.

Keywords: *Kaum; Pekal Tribe; Migrant Ethnicity*

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang kaya akan keberagaman suku, budaya, dan etnis yang tersebar di seluruh wilayah nusantara. Keberagaman ini merupakan kekayaan bangsa sekaligus tantangan nyata dalam membangun harmoni sosial di tengah masyarakat yang majemuk (Marbun, 2022). Lebih dari 300 kelompok etnis hidup berdampingan di Indonesia, masing-masing membawa sistem nilai, bahasa, dan tradisi yang berbeda-beda. Kondisi kemajemukan ini menciptakan dinamika sosial yang kompleks, di mana hubungan antarkelompok etnis dapat berlangsung secara harmonis maupun penuh ketegangan bergantung pada bagaimana perbedaan tersebut dikelola oleh komunitas dan institusi sosial yang ada.

Interaksi antara kelompok etnis yang berbeda tidak jarang menimbulkan dinamika sosial yang kompleks, mulai dari proses akulturasi,

This work licensed under attribution-sharealike 4.0 international (CC BY-SA 4.0)

adaptasi budaya, hingga konflik horizontal yang bersumber dari perbedaan kepentingan dan nilai (Hariansyah et al., 2024) . Konflik-konflik tersebut sering kali tidak bersifat primordial semata, melainkan dilatarbelakangi oleh persaingan sumber daya, ketimpangan ekonomi, dan ketidakhadiran mekanisme integrasi sosial yang memadai. Oleh karena itu, studi mengenai mekanisme-mekanisme lokal yang mampu memfasilitasi integrasi antaretnis menjadi sangat penting dan mendesak untuk dilakukan.

Di Provinsi Bengkulu, salah satu kelompok etnis yang menarik untuk dikaji adalah Suku Pekal. Suku Pekal merupakan kelompok etnis asli yang mendiami wilayah Kabupaten Mukomuko dan sekitarnya di pesisir barat Sumatera. Secara historis, Suku Pekal terbentuk melalui proses akulturasi dari tiga suku besar, yakni Minangkabau, Rejang, dan Melayu, sehingga identitas budayanya bersifat dinamis dan tidak monolitik. Proses pembentukan identitas yang bersifat akulturatif ini menjadikan Suku Pekal sebagai entitas sosial yang memiliki keterbukaan inheren terhadap pengaruh budaya luar, sebuah karakteristik yang membedakannya dari banyak kelompok etnis lain yang cenderung protektif terhadap kemurnian budayanya.

Salah satu aspek paling khas dalam struktur sosial Suku Pekal adalah keberadaan sistem kaum. Kaum dalam masyarakat Pekal merupakan unit kekerabatan yang berfungsi serupa dengan marga atau klan, di mana setiap desa dapat memiliki kaum-kaum yang berbeda dengan karakteristik dan adat istiadat yang beragam pula. Sistem kaum ini menjadi pintu gerbang integrasi sosial bagi siapa pun, termasuk etnis pendatang, yang ingin menjadi bagian dari komunitas Pekal. Fenomena migrasi dan perpindahan penduduk lintas etnis ke wilayah yang dihuni Suku Pekal membawa konsekuensi sosial yang signifikan. Etnis pendatang dari berbagai latar belakang budaya harus beradaptasi dengan sistem sosial yang ada, sementara masyarakat Pekal pun dituntut untuk mengelola hubungan dengan para pendatang tersebut secara arif dan berkeadilan.

Kajian tentang komunikasi antarbudaya dan integrasi sosial antar etnis telah banyak dilakukan di berbagai konteks Indonesia. Kristianto & Darmastuti (2024) mengkaji komunikasi antarbudaya mahasiswa Dayak dan Jawa di Salatiga dalam konteks akulturasi budaya dan menemukan bahwa akulturasi merupakan proses dinamis yang melibatkan negosiasi identitas aktif dari kedua belah pihak. Tobing & Theresia (2024) meneliti hambatan komunikasi antarbudaya antara Suku Laut dan Suku Melayu di Kepulauan Riau, menemukan bahwa perbedaan sistem bahasa, nilai, dan tradisi menciptakan hambatan signifikan dalam interaksi sehari-hari. Manggola (2021) menganalisis pola komunikasi antarbudaya pada pasangan suami istri beda suku dan menemukan bahwa keberhasilan komunikasi lintas budaya sangat ditentukan oleh kemauan untuk saling memahami dan menghargai perbedaan. Kajian-kajian tersebut secara keseluruhan menunjukkan bahwa interaksi lintas budaya merupakan proses yang sarat dengan negosiasi makna dan identitas, serta memerlukan mekanisme fasilitasi yang tepat.

This work licensed under attribution-sharealike 4.0 international (CC BY-SA 4.0)

Dalam konteks yang lebih luas, Hartono et al., (2024) mengidentifikasi berbagai tantangan dalam implementasi nilai-nilai multikultural di lembaga pendidikan, yang mencerminkan kompleksitas pengelolaan keberagaman di tataran institusional. Saripudin et al., (2023) menekankan pentingnya komunikasi lintas budaya dalam era modern sebagai fondasi membangun masyarakat multikultural yang harmonis, di mana setiap kelompok dapat mempertahankan identitas kulturalnya sambil hidup berdampingan secara damai. Sementara itu, Harahap (2024) menunjukkan bahwa perbedaan budaya dalam konteks pernikahan antaretnis memiliki dampak nyata terhadap stabilitas hubungan, sementara Limpahala & Cahyono (2024) mengkaji dimensi kebutuhan dasar dalam pernikahan beda etnis antara Suku Alas dan Suku Jawa, memberikan perspektif tentang bagaimana perbedaan etnis dinegosiasikan dalam konteks hubungan interpersonal yang intim.

Penelitian ini menggunakan kerangka teori konstruksi realita sosial yang dikembangkan oleh Peter L. Berger dan Thomas Luckmann sebagai pisau analisis utama. Berger & Luckmann (1966) berargumen bahwa realitas sosial bukanlah sesuatu yang ada dengan sendirinya, melainkan dikonstruksi secara terus-menerus oleh manusia melalui interaksi sosial mereka. Teori ini memandang bahwa realitas sosial dikonstruksi melalui tiga momen dialektis yang saling berkaitan yaitu pertama eksternalisasi, proses di mana manusia mencurahkan dirinya ke dalam dunia melalui aktivitas fisik maupun mental, kedua objektivasi yaitu proses di mana produk-produk aktivitas manusia tersebut menghadirkan diri sebagai realitas objektif yang berdiri sendiri di luar individu, dan ketiga internalisasi yaitu proses di mana dunia yang telah terobjektivasi tersebut diserap kembali ke dalam kesadaran manusia sebagai realitas subjektif. Melalui kerangka ini, sistem kaum dan proses keterbukaan Suku Pekal dapat dipahami bukan sebagai fenomena statis, melainkan sebagai konstruksi sosial yang terus berlangsung dan direproduksi oleh para aktornya.

Nurfalah et al., (2023) dalam kajian mereka tentang Suku Baduy Luar menunjukkan bahwa komunitas adat pun mampu melakukan adaptasi selektif terhadap pengaruh luar tanpa kehilangan esensi identitas kulturalnya. Temuan ini relevan dalam memahami bagaimana Suku Pekal, meskipun memiliki sistem adat yang kuat, mampu membangun mekanisme penerimaan terhadap etnis pendatang yang bersifat inklusif sekaligus menjaga integritas nilai-nilai adatnya.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan sistem kaum sebagai struktur sosial utama dalam masyarakat Suku Pekal dan fungsinya dalam kehidupan sehari-hari, menganalisis mekanisme penerimaan etnis pendatang melalui sistem kaum beserta prosedur dan persyaratannya, dan menginterpretasikan proses keterbukaan Suku Pekal terhadap etnis pendatang dalam perspektif teori konstruksi realita sosial Berger dan Luckmann. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi empiris tentang model integrasi sosial berbasis

This work licensed under attribution-sharealike 4.0 international (CC BY-SA 4.0)

kearifan lokal yang dapat menjadi referensi bagi pengelolaan keberagaman etnis di Indonesia.

KERANGKA TEORI

Konstruksi Realitas Sosial

Dalam konteks yang lebih luas, Hartono et al., (2024) mengidentifikasi berbagai tantangan dalam implementasi nilai-nilai multikultural di lembaga pendidikan, yang mencerminkan kompleksitas pengelolaan keberagaman di tataran institusional. Saripudin et al., (2023) menekankan pentingnya komunikasi lintas budaya dalam era modern sebagai fondasi membangun masyarakat multikultural yang harmonis, di mana setiap kelompok dapat mempertahankan identitas kulturalnya sambil hidup berdampingan secara damai. Sementara itu, Harahap (2024) menunjukkan bahwa perbedaan budaya dalam konteks pernikahan antaretnis memiliki dampak nyata terhadap stabilitas hubungan, sementara Limpahala & Cahyono (2024) mengkaji dimensi kebutuhan dasar dalam pernikahan beda etnis antara Suku Alas dan Suku Jawa, memberikan perspektif tentang bagaimana perbedaan etnis dinegosiasikan dalam konteks hubungan interpersonal yang intim.

Penelitian ini menggunakan kerangka teori konstruksi realita sosial yang dikembangkan oleh Peter L. Berger dan Thomas Luckmann sebagai pisau analisis utama. Berger & Luckmann (1966) berargumen bahwa realitas sosial bukanlah sesuatu yang ada dengan sendirinya, melainkan dikonstruksi secara terus-menerus oleh manusia melalui interaksi sosial mereka. Teori ini memandang bahwa realitas sosial dikonstruksi melalui tiga momen dialektis yang saling berkaitan yaitu pertama eksternalisasi, proses di mana manusia mencurahkan dirinya ke dalam dunia melalui aktivitas fisik maupun mental, kedua objektivasi yaitu proses di mana produk-produk aktivitas manusia tersebut menghadirkan diri sebagai realitas objektif yang berdiri sendiri di luar individu, dan ketiga internalisasi yaitu proses di mana dunia yang telah terobjektivasi tersebut diserap kembali ke dalam kesadaran manusia sebagai realitas subjektif. Melalui kerangka ini, sistem kaum dan proses keterbukaan Suku Pekal dapat dipahami bukan sebagai fenomena statis, melainkan sebagai konstruksi sosial yang terus berlangsung dan direproduksi oleh para aktornya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus (case study). Pemilihan pendekatan kualitatif didasarkan pada pertimbangan bahwa penelitian ini bertujuan untuk memahami proses sosial secara mendalam, termasuk makna-makna yang dikonstruksi oleh para aktor sosial dalam interaksi lintas etnis, sesuatu yang tidak dapat dicapai secara memadai melalui pendekatan kuantitatif (Creswell, 2014). Pendekatan

This work licensed under attribution-sharealike 4.0 international (CC BY-SA 4.0)

kualitatif memungkinkan peneliti untuk menggali perspektif, pengalaman, dan pemaknaan subjektif para informan secara holistik dan kontekstual. Desain studi kasus dipilih karena memungkinkan peneliti untuk menginvestigasi fenomena keterbukaan Suku Pekal secara komprehensif dalam konteks kehidupan nyata, dengan memperhatikan berbagai aspek yang saling berkaitan dalam sistem sosial yang kompleks.

Penelitian dilakukan di Kota Bengkulu sebagai pusat komunitas perantauan Suku Pekal. Informan penelitian dipilih menggunakan teknik purposive sampling, yakni pemilihan informan secara sengaja berdasarkan kriteria tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian. Kriteria utama pemilihan informan mencakup anggota atau memiliki keterkaitan langsung dengan komunitas Suku Pekal, memiliki pengetahuan dan pengalaman yang memadai tentang sistem kaum dan dinamika sosial dalam masyarakat Pekal, dan bersedia untuk berpartisipasi dalam wawancara mendalam. Berdasarkan kriteria tersebut, terpilih empat informan kunci yang mewakili perspektif yang beragam dan saling melengkapi.

Informan pertama adalah Azam, Ketua Umum Ikatan Mahasiswa Ipuh (IMSI), yang mewakili perspektif generasi muda Pekal yang berada di perantauan namun tetap mempertahankan identitas dan pengetahuan budayanya. Informan kedua adalah Atika, Wakil Ketua Umum IMSI, yang memberikan pandangan komplementer tentang identitas dan keterbukaan budaya Pekal dari sudut pandang perempuan muda Pekal perantauan. Informan ketiga adalah Jeffry, mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Bengkulu angkatan 2024, yang mewakili perspektif akademisi muda yang memiliki minat terhadap isu-isu komunikasi antarbudaya. Informan keempat adalah Azim, warga Desa Bagindo Bungkuk, Mukomuko, yang memberikan perspektif masyarakat akar rumput yang hidup langsung dalam sistem sosial Suku Pekal. Informan kelima adalah Hadison, Ketua Ikatan Pemuda Pekal, yang mewakili perspektif kepemimpinan komunitas dan memiliki otoritas pengetahuan tentang adat dan tradisi Suku Pekal.

Data dikumpulkan melalui tiga teknik yang saling melengkapi. Pertama, wawancara mendalam (in-depth interview) semi-terstruktur menjadi teknik pengumpulan data utama. Panduan wawancara disusun berdasarkan aspek-aspek yang relevan dengan teori konstruksi realita sosial Berger dan Luckmann, meliputi pertanyaan-pertanyaan tentang asal-usul dan identitas Suku Pekal, fungsi dan struktur sistem kaum, prosedur penerimaan etnis pendatang, serta pengalaman interaksi antara warga Pekal dan etnis pendatang. Wawancara dilakukan dalam suasana yang nyaman dan informal untuk mendorong keterbukaan informan dalam berbagi pengalaman dan perspektifnya. Kedua, observasi partisipan dilakukan untuk memperoleh pemahaman langsung tentang dinamika sosial dalam komunitas Suku Pekal.

Analisis data dilakukan menggunakan model analisis interaktif yang dikembangkan oleh Miles et al., (2014), yang mencakup tiga tahapan yang berlangsung secara simultan dan berulang. Tahap pertama adalah kondensasi

This work licensed under attribution-sharealike 4.0 international (CC BY-SA 4.0)

data (data condensation), yaitu proses memilih, memfokuskan, menyederhanakan, mengabstraksi, dan mentransformasikan data mentah yang diperoleh dari lapangan. Pada tahap ini, peneliti melakukan coding terhadap transkrip wawancara untuk mengidentifikasi tema-tema yang muncul berkaitan dengan sistem kaum dan mekanisme penerimaan etnis pendatang. Tahap kedua adalah penyajian data (data display), di mana data yang telah dikondensasi disajikan dalam bentuk teks naratif yang sistematis. Tahap ketiga adalah penarikan dan verifikasi kesimpulan (conclusion drawing and verification), di mana peneliti merumuskan interpretasi atas temuan-temuan yang diperoleh.

Keabsahan data diuji melalui beberapa teknik. Pertama, triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan dan mengkroscek data yang diperoleh dari berbagai informan untuk memastikan konsistensi dan kredibilitas temuan. Kedua, triangulasi metode dilakukan dengan membandingkan data wawancara dengan data observasi dan dokumentasi. Ketiga, member checking dilakukan dengan mengonfirmasikan temuan-temuan utama kepada sebagian informan untuk memastikan akurasi interpretasi peneliti. Kombinasi teknik-teknik triangulasi ini memastikan bahwa temuan penelitian memiliki kredibilitas dan dapat dipercaya.

Penelitian ini dilaksanakan dengan memperhatikan etika penelitian yang ketat. Seluruh informan diberikan informed consent sebelum wawancara dilakukan, dengan penjelasan yang memadai tentang tujuan penelitian, penggunaan data, dan hak-hak mereka sebagai partisipan. Identitas informan dijaga kerahasiaannya sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat, dan penggunaan nama dalam laporan penelitian dilakukan atas persetujuan masing-masing informan.

PEMBAHASAN

Asal-Usul Suku Pekal sebagai Produk Akulturasi dan Fondasi Keterbukaan Sosial

Berdasarkan hasil wawancara dengan seluruh informan, diperoleh temuan yang sangat konsisten bahwa Suku Pekal merupakan kelompok etnis yang terbentuk melalui proses akulturasi panjang dari tiga suku besar, yakni Minangkabau, Rejang, dan Melayu. Keseluruhan informan secara independen menyampaikan pernyataan yang selaras mengenai asal-usul ini. Konsistensi pernyataan dari berbagai informan yang memiliki latar belakang, usia, dan posisi sosial yang berbeda menunjukkan bahwa pengetahuan tentang identitas akulturatif Suku Pekal telah menjadi common knowledge yang mengakar kuat di kalangan masyarakat Pekal lintas generasi. Sebagaimana yang disampaikan oleh Azam selaku Ketua Umum IMSI ketika ditanya mengenai asal-usul Suku Pekal:

This work licensed under attribution-sharealike 4.0 international (CC BY-SA 4.0)

Journal of Communication Management and Organization
Desember 2026, Vol. 5, No. 2, pp.66-80
E-ISSN: 2830-1439

> "Pekal itu sebenarnya sudah dari sananya terbuka, karena memang suku kita ini lahir dari pertemuan tiga suku besar, Minangkabau, Rejang, dan Melayu. Jadi wajar kalau orang Pekal itu terbiasa menerima orang dari luar, karena nenek moyang kita sendiri sudah berasal dari berbagai suku."

Pernyataan Azam ini sangat signifikan karena tidak hanya mengkonfirmasi asal-usul historis Suku Pekal, tetapi juga menunjukkan adanya kesadaran kolektif bahwa keterbukaan merupakan bagian tak terpisahkan dari identitas mereka. Keterbukaan Suku Pekal bukan sekadar sikap toleransi yang dipaksakan dari luar, melainkan merupakan bagian inheren dari identitas kolektif yang terbentuk secara historis. Hal senada juga diungkapkan oleh Hadison selaku Ketua Ikatan Pemuda Pekal yang menegaskan bahwa warisan budaya yang beragam dari tiga suku pendiri justru menjadi kekuatan yang membentuk karakter terbuka masyarakat Pekal hingga saat ini:

> "Orang Pekal itu tidak pernah menutup diri dari pendatang. Sudah dari dulu begitu. Karena kita sendiri juga asalnya dari perpaduan berbagai suku, jadi tidak ada alasan untuk menolak orang lain masuk."

Jeffry, mahasiswa Ilmu Komunikasi yang memiliki minat khusus terhadap kajian budaya lokal Bengkulu, menambahkan dimensi lain dari perspektif asal-usul Suku Pekal. Menurutnya, proses pembentukan identitas Pekal yang akulturatif tersebut tidak terjadi dalam sekejap, melainkan merupakan hasil dari interaksi lintas budaya yang berlangsung selama berabad-abad, di mana masing-masing unsur budaya saling menyesuaikan dan melebur tanpa menghilangkan satu sama lain.

Temuan mengenai asal-usul akulturatif Suku Pekal ini memiliki implikasi yang sangat penting bagi pemahaman kita tentang keterbukaan mereka terhadap etnis pendatang. Keterbukaan tersebut bukan hanya sebuah kebijakan atau keputusan sadar yang dibuat oleh generasi sekarang, melainkan merupakan warisan nilai yang telah terinternalisasi secara mendalam melalui proses sosialisasi lintas generasi. Nilai keterbukaan ini kemudian menjadi fondasi yang kokoh bagi berkembangnya sistem kaum sebagai mekanisme integrasi sosial yang inklusif.

Sistem Kaum Sebagai Struktur Sosial Utama Masyarakat Pekal

Temuan paling sentral dalam penelitian ini adalah keberadaan dan fungsi sistem kaum dalam masyarakat Suku Pekal. Kaum merupakan unit sosial kekerabatan yang berfungsi serupa dengan marga atau klan, yang mengorganisir kehidupan sosial masyarakat Pekal secara menyeluruh. Berbeda dengan sistem kekerabatan yang sekedar bersifat silsilah atau garis keturunan, kaum dalam masyarakat Pekal memiliki fungsi-fungsi sosial yang sangat konkret dan menyentuh berbagai aspek kehidupan sehari-hari, mulai

This work licensed under attribution-sharealike 4.0 international (CC BY-SA 4.0)

dari penyelesaian sengketa, penyelenggaraan hajatan dan upacara adat, hingga pemberian dukungan sosial kepada anggota yang mengalami kesulitan.

Salah satu temuan yang paling menarik adalah kenyataan bahwa sistem kaum tidak bersifat seragam di seluruh wilayah Suku Pekal. Setiap desa memiliki komposisi dan corak kaum yang berbeda-beda, mencerminkan keragaman internal dalam masyarakat Pekal. Atika, Wakil Ketua Umum IMSI, menjelaskan ragam antarkaum ini dengan sangat jelas:

> "Setiap desa itu beda-beda kaumnya. Kalau untuk adat istiadat, Desa Sibak misalnya, masih cukup kental adat istiadatnya dibanding desa-desa lain. Di sana, peran kaum dalam kehidupan masyarakat masih sangat kuat dan dihormati. Kalau untuk Desa Sibak sendiri ada enam kaum, Kaum Palitokari, Kaum Melayu Kecik, Kaum Melayu Gedang, Kaum 14.1, Kaum 14.2, dan Kaum Air Pisang"

Pernyataan Atika ini mengungkap bahwa sistem kaum bukan sebuah struktur monolitik yang seragam di seluruh wilayah Pekal, melainkan beragam sesuai dengan konteks lokal masing-masing desa. Desa Sibak yang disebutkan Atika menjadi representasi desa dengan intensitas adat yang tinggi, di mana peran kaum sangat dominan dalam mengatur kehidupan sosial warganya. Sementara di desa-desa lain, tingkat kekentalan adat mungkin berbeda, namun eksistensi kaum sebagai institusi sosial tetap diakui dan dihormati.

Keberagaman internal sistem kaum ini justru menunjukkan vitalitasnya sebagai institusi sosial yang hidup dan adaptif. Kaum tidak hanya berfungsi sebagai penjaga tradisi, tetapi juga mampu merespons konteks lokal yang berbeda-beda. Hadison menambahkan bahwa meskipun setiap kaum memiliki karakteristiknya sendiri, ada prinsip-prinsip dasar yang berlaku universal dalam seluruh sistem kaum di masyarakat Pekal, yaitu solidaritas internal, gotong royong, dan keterbukaan terhadap anggota baru yang memenuhi persyaratan adat.

Azim, warga Desa Bagindo Bungkuk yang telah lama hidup dalam sistem sosial Pekal, memberikan gambaran yang lebih konkret tentang fungsi kaum dalam kehidupan sehari-hari. Menurutnya, kaum adalah tempat seseorang berpaling ketika menghadapi berbagai urusan penting dalam hidupnya, mulai dari pernikahan, kematian, pembangunan rumah, hingga penyelesaian perselisihan dengan pihak lain. Tanpa afiliasi kaum, seseorang akan kesulitan mengakses jaringan dukungan sosial yang menjadi tulang punggung kehidupan komunitas Pekal.

Kaum sebagai Pintu Masuk Integrasi dalam Kehidupan Etnis Pendatang

Salah satu aspek paling kritis yang terungkap dari wawancara adalah urgensi bergabung ke dalam kaum bagi etnis pendatang yang menetap di wilayah Suku Pekal. Seluruh informan, tanpa kecuali, menegaskan bahwa

This work licensed under attribution-sharealike 4.0 international (CC BY-SA 4.0)

bergabung ke dalam kaum merupakan langkah yang sangat penting bahkan hampir tidak terhindarkan bagi etnis pendatang yang ingin diterima sepenuhnya oleh masyarakat Pekal. Hadison, selaku Ketua Ikatan Pemuda Pekal yang memiliki pemahaman mendalam tentang dinamika sosial komunitas, mengungkapkan hal ini secara langsung dan tegas:

> "Etnis pendatang sangat disarankan untuk memasuki kaum karena kaum itu diibaratkan seperti sebuah marga. Kalau etnis pendatang tidak masuk kaum, maka urusan-urusan yang lainnya tidak akan terlalu diurus oleh masyarakat setempat. Mereka akan seperti orang asing terus, meskipun sudah tinggal bertahun-tahun."

Pernyataan Hadison ini sangat penting karena mengungkap dimensi fungsional dan konsekuensial dari sistem kaum. Kaum bukan sekadar identitas kultural yang bersifat seremonial, tetapi merupakan jaringan sosial yang memiliki fungsi-fungsi praktis yang sangat nyata dalam kehidupan sehari-hari. Seseorang yang tidak terdaftar dalam kaum mana pun pada dasarnya berada di luar jangkauan jaringan sosial yang melindungi dan mendukung anggotanya. Urusan-urusan seperti penyelesaian konflik dengan pihak lain, penyelenggaraan hajatan pernikahan atau kematian, gotong royong dalam musibah, hingga representasi dalam forum adat itu semuanya dikelola melalui kaum.

Jeffry, dari perspektif akademisinya sebagai mahasiswa, menambahkan bahwa dorongan untuk masuk kaum ini berlaku tanpa memandang asal-usul etnis pendatang, apakah mereka berasal dari Jawa, Batak, Sunda, Bugis, atau etnis manapun di Indonesia. Selama seseorang menetap di wilayah Suku Pekal dan berniat untuk menjadi bagian dari komunitas, maka bergabung ke dalam kaum adalah jalan yang terbuka lebar bagi siapapun:

> "Tidak ada diskriminasi soal suku apa pendatang itu. Yang penting dia mau mengikuti prosedur adat masuk kaum, dia diterima. Pekal itu tidak pilih-pilih, selama pendatang mau menghormati adat kita."

Perspektif Jeffry ini menegaskan dimensi inklusivitas universal dari sistem kaum Pekal. Inklusivitas yang ditawarkan bukan berdasarkan kedekatan rasial atau etnis, melainkan berdasarkan kesediaan untuk menghormati dan mengikuti prosedur adat yang telah ditetapkan. Ini merupakan model integrasi yang sangat menarik dan berpotensi menjadi referensi bagi pengelolaan keberagaman etnis di berbagai konteks lain di Indonesia.

Tata Cara Masuk Kaum (Prosedur yang Beragam tapi Berprinsip Sama)

Meskipun setiap kaum memiliki tata cara masuk yang berbeda-beda sesuai dengan adat masing-masing, penelitian ini berhasil mengidentifikasi pola umum yang berlaku secara luas dalam masyarakat Suku Pekal. Atika,

This work licensed under attribution-sharealike 4.0 international (CC BY-SA 4.0)

Wakil Ketua Umum IMSI yang juga memiliki pengetahuan mendalam tentang adat Pekal, menjelaskan prosedur umum ini secara rinci berdasarkan pengalamannya sebagai Masyarakat Suku Pekal

> "Cara masuk kaum itu berbeda-beda tergantung kaumnya, tapi yang paling umum adalah pendatang itu mendatangi kepala kaum yang ingin ia masuki. Kalau dia datang tanpa ada keluarga yang dikenal di kaum itu, biasanya dikenakan kontribusi sekitar enam juta dan biasanya dianjurkan mengadakan syukuran di rumah dengan memotong kambing atau ayam. Tapi kalau dia punya hubungan keluarga misalnya suami yang mengikuti istri yang sudah anggota kaum itu lebih ringan, sekitar tiga juta dan tetap mengadakan syukuran."

Berdasarkan keterangan Atika tersebut, dapat diidentifikasi setidaknya tiga elemen kunci dalam prosedur masuk kaum. Elemen pertama adalah kunjungan kepada kepala kaum (silaturahmi adat). Kunjungan ini merupakan langkah awal yang wajib dilakukan oleh setiap calon anggota baru. Ini bukan sekadar formalitas administratif, tetapi sebuah ritual sosial yang mempertemukan calon anggota baru dengan otoritas adat tertinggi dalam kaum. Melalui kunjungan ini, calon anggota menyatakan niat dan kesungguhan hatinya untuk menjadi bagian dari kaum, sementara kepala kaum dapat menilai kesiapan dan komitmen calon anggota.

Elemen kedua adalah kontribusi finansial yang bersifat graduatif. Kontribusi sebesar Rp 6.000.000 berlaku bagi pendatang yang tidak memiliki koneksi atau keluarga dalam kaum yang dituju, sementara kontribusi yang lebih ringan sebesar Rp 3.000.000 berlaku bagi pendatang yang memiliki hubungan kekerabatan dengan anggota kaum yang ada. Perbedaan besaran kontribusi ini mencerminkan prinsip keadilan adat yaitu koneksi sosial yang sudah ada dipandang sebagai modal sosial yang mengurangi risiko bagi kaum dalam menerima anggota baru, sehingga persyaratan finansialnya pun disesuaikan.

Azim memperkuat penjelasan mengenai makna kontribusi finansial ini dari perspektif warga akar rumput:

> "Uang yang dibayarkan itu bukan seperti membeli keanggotaan. Itu lebih kepada bentuk komitmen, bukti bahwa pendatang itu serius ingin jadi bagian dari kaum dan masyarakat kita. Nilainya bukan di jumlah uangnya, tapi di niat dan kesungguhannya."

Elemen ketiga adalah penyelenggaraan syukuran di rumah pendatang. Ini merupakan ritual yang paling kaya makna secara simbolis. Dengan menggelar syukuran dan mengundang anggota kaum ke rumahnya, pendatang secara eksplisit mengumumkan kepada seluruh komunitas bahwa ia kini adalah bagian dari kaum tersebut. Pemotongan hewan (kambing atau ayam) dalam syukuran tersebut merupakan simbol pengorbanan dan kesediaan untuk berbagi nilai-nilai inti yang dijunjung tinggi dalam komunitas adat.

This work licensed under attribution-sharealike 4.0 international (CC BY-SA 4.0)

Acara ini juga menjadi medium yang sangat efektif bagi anggota kaum untuk mengenal pendatang secara personal, sehingga proses integrasi sosial yang lebih organik dapat dimulai dari titik tersebut.

Hadison menambahkan bahwa ragam dalam prosedur masuk kaum antarkaum sebenarnya mencerminkan otonomi masing-masing kaum dalam mengatur urusan internalnya. Tidak ada satu otoritas pusat yang menetapkan standar seragam, melainkan setiap kaum memiliki kewenangan untuk menentukan prosedur dan persyaratannya sendiri berdasarkan kesepakatan internal dan tradisi yang telah berlangsung turun-temurun. Perbedaan ini bukan kelemahan sistem, melainkan justru mencerminkan fleksibilitas dan desentralisasi otoritas yang menjadi kekuatan sistem kaum.

Penerimaan Penuh Etnis Pendatang dalam Perayaan Adat Suku Pekal

Indikator terkuat dari keterbukaan Suku Pekal terhadap etnis pendatang adalah kenyataan bahwa mereka yang telah bergabung ke dalam kaum dilibatkan secara penuh dan setara dalam seluruh perayaan dan kegiatan adat. Ini merupakan manifestasi konkret dari komitmen masyarakat Pekal untuk benar-benar menerima pendatang sebagai bagian dari komunitas, bukan sekadar mentoleransi kehadiran mereka. Azim mengungkapkan hal ini dengan penuh keyakinan berdasarkan pengalamannya menyaksikan langsung dinamika sosial di Desa Bagindo Bungkuk:

> "Kalau sudah masuk kaum, pendatang itu sudah dianggap bagian dari kita. Mereka ikut dalam acara adat, diundang ketika ada hajatan, dan diperlakukan sama seperti anggota kaum yang lain. Tidak ada perbedaan. Bahkan ada pendatang yang sudah bertahun-tahun di sini dan sekarang sudah jadi bagian inti komunitas, aktif di berbagai kegiatan adat."

Pernyataan Azim ini mengkonfirmasi bahwa integrasi yang ditawarkan oleh sistem kaum bersifat substantif dan menyeluruh, bukan sekadar partisipasi seremonial yang bersifat simbolis. Etnis pendatang yang telah menjadi anggota kaum tidak hanya ditoleransi keberadaannya, tetapi benar-benar diikutsertakan sebagai warga penuh komunitas Pekal yang memiliki hak dan kewajiban yang setara.

Atika memperkuat temuan ini dengan menjelaskan bahwa keikutsertaan etnis pendatang dalam perayaan adat bukan hanya sekadar diizinkan, tetapi bahkan diharapkan dan dianggap sebagai bukti keberhasilan integrasi:

> "Kalau pendatang yang sudah masuk kaum tidak hadir dalam acara adat, itu justru aneh. Karena mereka sudah bagian dari kaum, ya mereka punya kewajiban yang sama dengan anggota lain. Tidak hadir dalam hajatan itu sama dengan tidak menghormati kaum."

This work licensed under attribution-sharealike 4.0 international (CC BY-SA 4.0)

Pernyataan Atika ini mengungkap dimensi yang sangat menarik dimana integrasi dalam sistem kaum bukan hanya memberikan hak kepada etnis pendatang, tetapi juga menuntut kewajiban yang setara. Pendatang yang telah menjadi anggota kaum diharapkan untuk berpartisipasi aktif, bukan hanya sebagai penerima manfaat tetapi juga sebagai kontributor aktif kehidupan komunitas. Ini merupakan bentuk integrasi yang sesungguhnya bukan sekadar inklusi formal, tetapi partisipasi substantif dalam kehidupan bersama.

Jeffry, dari perspektif studinya tentang komunikasi antarbudaya, mengamati bahwa proses integrasi melalui sistem kaum ini menciptakan kondisi yang sangat kondusif bagi terjadinya pertukaran budaya yang autentik dan timbal balik. Etnis pendatang tidak hanya mengadopsi nilai-nilai Pekal, tetapi dalam batas-batas tertentu juga membawa pengaruh budaya mereka sendiri yang kemudian diserap secara selektif oleh masyarakat Pekal:

> "Yang menarik itu, bukan hanya pendatang yang belajar budaya Pekal. Orang Pekal sendiri juga banyak belajar dari pendatang soal makanan, cara berbisnis, teknologi. Jadi integrasinya itu dua arah, tidak satu arah saja."

Temuan tentang integrasi dua arah yang diungkapkan Jeffry ini menambahkan dimensi penting pada pemahaman kita tentang keterbukaan Suku Pekal. Sistem kaum tidak hanya memfasilitasi integrasi pendatang ke dalam masyarakat Pekal, tetapi juga menciptakan ruang bagi pertukaran budaya yang dinamis dan mutual. Ini merupakan bentuk akulturasi yang paling ideal, di mana semua pihak saling memperkaya satu sama lain tanpa kehilangan identitas dasarnya.

Secara keseluruhan, temuan-temuan dalam penelitian ini dapat dianalisis melalui tiga momen dialektis konstruksi realita sosial Berger dan Luckmann. Pertama, eksternalisasi terwujud melalui seluruh rangkaian tindakan konkret yang dilakukan masyarakat Pekal dalam menerima etnis pendatang, tindakan kepala kaum yang menerima dan memproses permohonan pendatang, penyelenggaraan syukuran sebagai ritual legitimasi, dan keikutsertaan pendatang dalam upacara adat. Semua tindakan ini merupakan pencurahan nilai-nilai keterbukaan Pekal ke dalam dunia nyata yang dapat diamati dan dirasakan oleh semua pihak. Kedua, objektivasi terjadi ketika prosedur bergabung kaum beserta seluruh persyaratan dan ritualnya menjadi cara yang benar dan sah yang diakui secara bersama, terlepas dari siapa yang mengikutinya. Prosedur ini hadir sebagai realitas objektif yang berdiri sendiri, bukan bergantung pada preferensi atau kesukaan individu tertentu. Ketiga, internalisasi berlangsung ketika etnis pendatang yang telah menjadi anggota kaum secara bertahap menghayati nilai-nilai Pekal sebagai bagian dari identitas sosial mereka, sebagaimana tercermin dari keterlibatan aktif mereka dalam perayaan adat dan kepatuhan mereka pada kewajiban-kewajiban sebagai anggota kaum.

This work licensed under attribution-sharealike 4.0 international (CC BY-SA 4.0)

Journal of Communication Management and Organization
Desember 2026, Vol. 5, No. 2, pp.66-80
E-ISSN: 2830-1439

KESIMPULAN

Penelitian ini berhasil mengidentifikasi bahwa sistem kaum merupakan inti dari proses keterbukaan Suku Pekal terhadap etnis pendatang di Kota Bengkulu. Suku Pekal, yang secara historis terbentuk dari akulturasi tiga suku besar yakni Minangkabau, Rejang, dan Melayu, memiliki keterbukaan yang telah menjadi bagian tak terpisahkan dari identitas kolektifnya. Kaum berfungsi sebagai unit kekerabatan yang berbeda-beda di setiap desa, dengan adat istiadat yang beragam namun tetap memiliki prinsip inklusivitas yang sama terhadap etnis pendatang.

Etnis pendatang sangat didorong untuk bergabung ke dalam kaum karena kaum ibarat marga yang menjadi fondasi partisipasi sosial di masyarakat Pekal. Tanpa keanggotaan kaum, urusan sosial etnis pendatang tidak akan sepenuhnya diperhatikan oleh komunitas setempat. Tata cara masuk kaum bervariasi, namun secara umum melibatkan silaturahmi kepada kepala kaum, kontribusi finansial yang disesuaikan dengan kondisi sosial pendatang, serta penyelenggaraan syukuran sebagai ritual legitimasi sosial yang mengumumkan keanggotaan baru kepada seluruh komunitas.

Melalui kerangka teori konstruksi realita sosial Berger dan Luckmann, proses keterbukaan Suku Pekal dapat dipahami sebagai dialektika tiga momen yang berlangsung secara terus-menerus yaitu dengan eksternalisasi melalui praktik penerimaan adat yang konkret, objektivasi melalui prosedur masuk kaum yang telah mapan dan diakui bersama, serta internalisasi nilai-nilai Pekal oleh etnis pendatang yang pada akhirnya berpartisipasi penuh dan aktif dalam perayaan adat. Keterbukaan Suku Pekal terbukti bukan sekadar retorika, melainkan terwujud dalam praktik sosial yang nyata dan berkelanjutan, menjadikan sistem kaum sebagai model integrasi antaretnis berbasis kearifan lokal yang layak untuk dijadikan referensi dalam perumusan kebijakan pengelolaan keberagaman etnis di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Berger, P. L., & Luckmann, T. (1966). The social construction of reality: A treatise in the sociology of knowledge.

Creswell, J. W. (2014). Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches (4th ed.).

Harahap, A. M. (2024). Pengaruh Perbedaan Budaya dan Tradisi Dalam Pernikahan Antar Etnis Terhadap Stabilitas Rumah Tangga di Kota Padangsidimpuan. El-Sirry: Jurnal Hukum Islam Dan Sosial, 2(1), 1–14. https://doi.org/10.24952/ejhis.v2i1.11016

Hariansyah, N. P., Nopianti, H., & Syaifullah. (2024). Analisis Aktor Terkait Konflik Horizontal Antara Suku Jawa dan Suku Pekal (Studi Kasus Dampak Dari Rencana Pertambangan Batubara PT . X di Desa Suka Maju

This work licensed under attribution-sharealike 4.0 international (CC BY-SA 4.0)

Kecamatan Marga Sakti Sebelat Bengkulu Utara). Manajemen Pendidikan Dan Ilmu Sosial, 5(6), 2775–2786.

Hartono, K. A., Riyanti, D., & Feriandi, Y. A. (2024). Tantangan dan Hambatan Pendidikan Multikultural di Sekolah Dasar Negeri. Harmoni Nusa Bangsa, 2, 243–251.

Kristianto, D., & Darmastuti, R. (2024). Komunikasi Antar Budaya Mahasiswa Suku Dayak dan Suku Jawa di Salatiga Dalam Akulturasi Budaya. Jurnal Ilmu Komunikasi, 9(2), 322–334.

Limpahala, F., & Cahyono, A. D. (2024). Pernikahan Beda Etnis Antara Suku Alas Dengan Suku Jawa Dikaji Dari Teori Kebutuhan Maslow. Ilmu Pendidikan Dan Psikologi, 4(4), 273–282.

Manggola, A. (2021). Pola Komunikasi Antar Budaya Pasangan Suami Istri Beda Suku. JOPPAS: Journal of Public Policy and Administration Silampari, 3, 26–39.

Marbun, S. (2022). Membangun Dunia Yang Berani: Menegakkan Keberagaman dan Kemajemukan di Indonesia. Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik (Juispol), 3(1), 20–34.

Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). Qualitative data analysis: A methods sourcebook (3rd ed.).

Nurfalah, L., Claresya, C. S. De, & Muhammad Brilliant Bidjaksono. (2023). Adaptasi Masyarakat Suku Baduy Luar Terhadap Perkembangan Global Berbasis Kearifan Lokal. Of Socio-Cultural Sustainability and Resilience, 1(1), 62–69.

Saripudin, Ernawati, D., & Sovania, E. (2023). Multikultural di Era Modern: Wujud Komunikasi Lintas Budaya. Budimas, 06(01), 1–8.

Tobing, M. M., & Theresia, E. R. (2024). Hambatan Komunikasi Antarbudaya Masyarakat Suku Laut Terhadap Masyarakat Suku Melayu di Kepulauan Riau. Cristian Humaniora, 8(1), 38–67.

This work licensed under attribution-sharealike 4.0 international (CC BY-SA 4.0)